

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD 2013-2017) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BANYUASIN DENGAN MENGGUNAKAN  
RASIO KEUANGAN**

**SKRIPSI**



**Nama : Malik  
NIM : 222015113**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD 2013-2017) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BANYUASIN DENGAN MENGGUNAKAN  
RASIO KEUANGAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Malik  
NIM : 222015113**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD 2013-2017)  
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Menggunakan  
Rasio Keuangan

Nama : Malik  
Nim : 2220150113  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Study : Akuntansi  
Mata kuliah pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,



**Drs. Sunardi, SE., M.Si**  
NIDN/NBM:0206046303/784021

Pembimbing II,



**Hj. Ida Zuraidah, S.E.AK., M.Si**  
NIDN/NBM:0224017201/944806

Mengetahui,  
Dekan

u.b. ketua Program Studi Akutansi



**Betri, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Malik

NIM : 22 2015 005

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



Malik

## ABSTRAK

### **Malik/222015113/2019/ Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2013-2017) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Menggunakan Rasio Keuangan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD 2013-2017) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Menggunakan Rasio Keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin yang beralamat di Jln Komplek Perkantoran Sekojo No.20, Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi Keuangan Daerah, rasio keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan rasio kemandirian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin dilihat dari (1) rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan belum efektif, (2) rasio efisiensi Keuangan Daerah tergolong cukup efisien 3) rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah. (4) rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, belanja operasi selalumengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) rasio kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah dan dalam kategori pola hubungan Instruktif

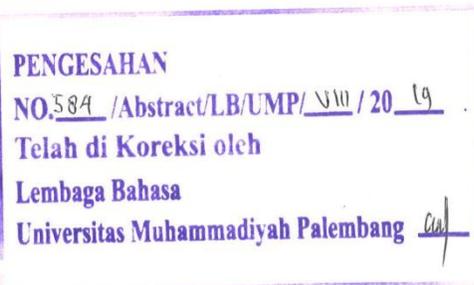
**Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

*Abstract*

*Malik / 222015113/2019 / The Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD 2013-2017) in the Regional Government of Kabupaten Banyuasin Using Financial Ratio.*

*This study aimed to find out and analyze the analysis of regional revenue and expenditure budget (APBD 2013-2017) in the regional government of Kabupaten Banyuasin using financial ratio. This study was quantitative descriptive. This research was conducted at the Regional Government of Kabupaten Banyuasin Using Financial Ratio at Jln Komplek Perkantoran Sekojo No.20, Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. This data was collected through documentation. The data analysis technique used was quantitative descriptive with the formula: the ratio of PAD effectiveness, Regional Financial efficiency ratio, harmony ratio, Growth Ratio, and independence ratio. The result of analysis showed that Kabupaten Banyuasin regional financial performance could be seen from (1) the effectiveness ratio of PAD could be categorized as effective, (2) Regional financial efficiency ratio was quite efficient 3) harmony ratio of the Kabupaten Banyuasin allocated a large portion of its expenditure budget to regional operating expenditure (4) Income growth ratio, PAD, operating expenses always increase from year to year and fluctuating Capital Expenditure Growth (5) Regional Financial independence ratio was still relatively Low and in the category of Instructive correlation pattern*

*Keywords: Regional Financial Performance, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Regional Financial Independence Ratio*



## PRAKATA



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD 2013-2017) pada pemerintah daerah kabupaten banyuasin dengan menggunakan rasio keuangan dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat serta keuarga dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Banyuasin dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Banyuasin dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio yang digunakan ialah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran dan mempermudah jalannya skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Drs. Sunardi, SE.,M.Si dan ibu Hj. Ida Zuraidah, S.E.AK.,M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta

saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini , untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akan tetapi dibalik keterbatasan penulis miliki, semoga karya penelitian tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan banyak pihak serta bernilai di hadapan Allah SWT. Aamiin

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Palembang, 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN/COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Rasio Keuangan .....	10
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	11
3. Belanja Daerah .....	18
B. Pengukuran Rasio Keuangan APBD .....	22
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	22
2. Rasio Efektivitas .....	24
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah .....	24
4. Rasio Keserasian .....	25
5. Rasio Pertumbuhan .....	27
C. Penelitian Sebelumnya .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Operasionalisasi Variabel .....	33

D. Data yang Digunakan .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin .....	38
B. Pembahasan APBD 2013-2017 .....	53
1. Rasio Efektivitas PAD .....	53
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah .....	54
3. Rasio Keserasian .....	55
4. Rasio Pertumbuhan .....	58
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. (Kasmir, 2009: 95)

Menurut Abdul Halim (2008:20) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Menurut Nurkholis ( 2019: 23) APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pengelolaan keuangan

daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 desember

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua hak kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. belanja adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun.

anggaran pemerintah daerah juga memiliki belanja. Belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah berbasis akrual yang menjadi lampiran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintah, belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah (Zamzami, 2014:153).

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga (Zamzami, 2014:153).

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beba pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kainde, 2013).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. ( Abdul Halim, 2012: 230).

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. dan

untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiesikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mardiasmo, (2013: 112).

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Abdul Halim (2012: 236)

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif Mahmudi (2010: 138).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lubis (2017) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. Hasil analisis data menunjukkan adanya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013 dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah dalam kategori sangat efektif di tahun 2011 - 2012 dan tidak efektif di tahun 2013. Sedangkan efisiensi keuangan daerah berada pada kategori sangat efisien. Bila dilihat dari rasio belanja aktivitas / kecocokan pada periode 2011-2012, Kabupaten Labuhan Batu masih memprioritaskan pengeluaran rutin dibanding belanja modal. Selain pertumbuhan pendapatan daerah cenderung

menurun dan negatif di tahun 2013, Pemkab Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena memiliki DSCR di atas 250% setiap tahunnya.

Pemerintah Daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak baik. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan analisis rasio. Penelitian ini akan dilakukan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan data dari laporan keuangan pemerintah kabupaten banyuasin tahun 2013-2017. Hasil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.1**

**Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Banyuasin**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
2013	Pendapatan Asli Daerah	54.270.272.232,52	81.364.386.883,24
	Pendapatan Transfer	1.496.071.578.651,92	1.470.136.237.713,00
	Pendapatan yang Sah	105.609.349.000,00	112.179.164.654,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.655.951.199.884,44</b>	<b>1.663.679.789.250,24</b>
	Belanja Operasi	1.220.749.613.796,81	1.107.121.753.879,63
	Belanja Modal	605.210.341.123,00	561.753.662.659,00
	Belanja Tidak Terduga	284.360.169,00	25.213.322,00
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.826.244.315.088,00</b>	<b>1.668.900.629.860,63</b>
2014	Pendapatan Asli Daerah	98.610.900.914,12	106.917.589.923,06
	Pendapatan Transfer	1.585.076.000.898,00	1.528.099.956.749,16

	Pendapatan yang Sah	198.378.071.500,00	198.020.654.647,00
	Total Pendapatan	1.882.064.973.312,12	1.833.038.201.319,22
	Belanja Operasi	1.346.832.493.489,12	1.261.560.268.127,88
	Belanja Modal	690.240.189.354,00	653.602.575.155,68
	Belanja Tidak Terduga	570.626.390,00	-
	Total Belanja Daerah	2.037.643.309.233,12	1.915.162.843.283,56
2015	Pendapatan Asli Daerah	95.634.810.558,00	92.219.655.177,21
	Pendapatan Transfer	1.737.938.233.800,00	1.623.717.739.062,48
	Pendapatan yang Sah	0	0
	Total Pendapatan	1.833.573.044.368,00	1.719.937.394.239,69
	Belanja Operasi	1.244.153.784.116,00	1.100.675.487.015,50
	Belanja Modal	510.821.358.346,00	439.408.057.812,00
	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	0
	Total Belanja Daerah	1.755.075.142.462,00	1.540.083.544.827,50
2016	Pendapatan Asli Daerah	121.235.723.749,49	104.218.245.467,43
	Pendapatan Transfer	2.045.017.435.410,91	1.833.008.806.063,41
	Pendapatan yang Sah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
	Total Pendapatan	2.180.253.159.180,40	1.951.227.051.530,84
	Belanja Operasi	1.356.926.066.800,19	1.233.754.239.112,98
	Belanja Modal	510.188.818.345,00	366.488.105.881,02
	Belanja Tidak Terduga	42.292.203.641,21	0,00
	Total Belanja Daerah	1.909.404.888.586,40	1.602.242.344.993,97
2017	Pendapatan Asli Daerah	110.150.232.067,00	125.984.368.887,92
	Pendapatan Transfer	1.904.407.033.224,05	1.880.437.883.556,56
	Pendapatan yang Sah	0	0
	Total Pendapatan	2.014.566.266.191,05	2.006.422.252.444,58
	Belanja Operasi	1.377.977.289.860,19	1.325.254.772.910,21
	Belanja Modal	334.174.227.227,66	303.104.686.231,70
	Belanja Tidak Terduga	41.774.468.342,00	0,00
	Total Belanja Daerah	1.753.925.985.429,85	1.628.359.459.141,91

Sumber: DPPKAD 2019

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2013 tercapai Pendapatan, tetapi pendapatan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2014 dan 2017 tidak tercapai pendapatan. dan dilihat dari pendapatan yang sah Pada tahun 2014 dan 2017 tidak memiliki target realisasi.

Selain dilihat dari Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2013 dan 2017 sangat efisien. pendapatan keberhasilan pemerintah daerah juga perlu dilihat dari belanja daerah yang dimana pada 5 tahun terakhir belanja daerah dipemerintahan Kabupaten Banyuasin mengalami ketidakstabilan belanja. Pada tahun 2013 dan 2014 jumlah belanja lebih tinggi dari Total Pendapatan. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, organisasi menghasilkan pendapatan merupakan hal yang lebih sulit dibanding membelanjakan. karena sifat belanja yang mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya kebocoran, penulis tertarik untuk menganalisis rasio keuangan yang ada Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai **"Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD 2013-2017) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Menggunakan Rasio Keuangan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD 2013-2017) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Menggunakan Rasio Keuangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD 2013-2017) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Menggunakan Rasio Keuangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan untuk memperbaiki dalam menyempurnakan laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Banyuasin.

#### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta dapat menambah wawasan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Christian Kainde (2013). Analisis Varians Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung
- Diah Nurdiawaty & Badruz Zaman (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri. *Ekonomika-Bisnis*, 7(1):31-40.
- Hery. (2016). *Financial Ratio For Business*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Irham Fahmi. (2015). *Pengantar manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Joko Pramono. (2014). Analisis Keuangan Untu Menilai Kinera Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Surakarta. *Among Makarti* 7(13):83-112.
- Julian, J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1):45-56.
- Kasmir. (2009). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1):55-66.
- Nurkholis, & M, Khusain. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusuna APBD*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintah*

Putri Kemala & Nurlia Hafni. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *Kitabah* , 1(1):21-45.

*Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.

Wakhyudi. (2013). Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan.* Vol. 1 No. 2, 2013